BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Sungai Hangat, Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci dapat disimpulkan bahwa:

1. Perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Sungai Hangat, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci dilakukan dengan berdasarkan hukum adat setempat, yaitu hanya berdasarkan pada kesepakatan antara pihak pemilik tanah dengan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan.
2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Sungai Hangat, Kecamatan Gunung Raya. Kabupaten Kerinci yaitu:
 - a. Alat ukur dalam penetapan mbangan bagian hasilnya di Desa Sungai Hangat tidak pasti, hal itu hanya tergantung pada kondisi atau keadaan tanah yang bersangkutan.
 - b. Tidak terlaksanannya hak dan kewajiban antara para pihak sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian sehingga menimbulkan wanprestasi.
 - c. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai dasar hukum atau undang-undang yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil.
 - d. Rasa sungkan karena hubungan keluarga ataupun tetangga yang menyebabkan keenganan untuk melakukan perjanjian secara tertulis

karena takut dianggap kurang mempercayai sesama masyarakat satu desa.

- e. Faktor budaya yang sangat kental dalam diri masyarakat Desa Sungai Hangat adalah kepercayaan mereka terhadap penggunaan adat istiadat yang diwariskan secara turun temurun, yang biasa diterapkan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian, karena adanya nilai tolong-menolong antar sesama.
3. Perlindungan hukum terhadap perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Sungai Hangat berlandaskan pada hukum adat, yaitu dengan cara musyawarah mufakat. Musyawarah tersebut dilakukan dengan dihadiri oleh para pihak yang melakukan perjanjian bagi hasil, Lembaga Adat Desa dan Kepala Desa. sehingga Penyelesaian sengketa antara pemilik dan penggarap di Desa Sungai Hangat diselesaikan melalui musyawarah bersama. Meskipun masih terdapat kendala berkaitan dengan kepastian hukum, permasalahan yang timbul masih dapat diselesaikan melalui hukum adat. Belum pernah ada yang menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan serta kesimpulan tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Sungai Hangat, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci kiranya penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya peran pemerintah desa dalam memperkuat kepastian hukum bagi perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Hal tersebut dapat dilakukan melalui

melakukan pencatatan perjanjian bagi hasil di kantor desa agar memiliki bukti hukum yang kuat apabila terjadi sengketa, serta menyelenggarakan penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian bagi hasil.

2. Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil, sebaiknya pemilik tanah ataupun penggarap haruslah membuka diri untuk melaksanakan perjanjian bagi hasil pertanian terhadap kemungkinan terjadinya resiko sengketa yang timbul, setidaknya masyarakat dalam melakukan perjanjian seharusnya dilakukan di hadapan kepala desa dan dihadirkan saksi dari masing-masing pihak pemilik tanah dan penggarap, agar apabila terjadi sengketa akan lebih mudah untuk diselesaikan, serta masyarakat lebih bisa meminimalisir wanprestasi yang terjadi akibat perjanjian bagi hasil. Agar terjamin perlindungan hukum dan kepastian hukumnya, baik bagi penggarap maupun pemilik tanah agar nantinya kedua belah pihak tidak merasa dirugikan atau diuntungkan secara sepihak.
3. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap perjanjian bagi hasil dengan cara menyediakan layanan mediasi bagi pihak yang bersengketa, sehingga dapat diselesaikan dengan adil tanpa harus melalui proses pengadilan yang rumit dan menyelenggarakan penyuluhan hukum bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian bagi hasil. Dengan adanya keterlibatan pemerintah desa, maka hukum adat dapat tetap dijalankan dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2019, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan*. Cetakan ke-2, Djambatan, Jakarta.
- Djamanat Samosir, 2013. *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan ke-2, CV Nuansa Aulia, Medan.
- Iskandar Zakaria, 1984, *Tambo Sakti Alam Kerinci*, Cetakan ke-1, Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, Jakarta, hlm. 191.
- Ketut Oka Setiawan, 2018, *Hukum Perikatan*, Cetakan ke-3, Sinar Grafika, Jakarta.
- Robiatul Auliyah dan Anis Wulandari, 2017, *Potret Bagi Hasil Pertanian*, Cetakan ke-1, Deppublish, Yogyakarta.
- Salim HS. Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, 2019, *Perancang Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Cetakan ke-8, Sinar Grafika, Jakarta.
- St. Laksanto Utomo, 2020, *Hukum Adat*, Cetakan ke-2, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*, Alfabeta, Bandung.
- Zakiah, 2017, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*, Cetakan ke-2, Lentera Kreasindo, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bagi Hasil.

C. Sumber Lain

- Hidup Iko, 2020, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah, Semarang" Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muhammad Syhani, 2023, "Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Padi di Kabupaten Kepulauan Meranti", Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Maret 2023
- Ninik Ayuhandika, 2024, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Lahan Dengan Penggarap Di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat", Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Lampung, Oktober 2024.
- Ni Luh Ariningsih Sari, 2021, "Konsep Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah dalam Hukum Tanah (UUPA) dan Konstitusi", *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 15, No. 1, 2021.
- Novyta Uktolseja dan Pieter Radjawane, "Tinjauan Juridis Perkembangan Tanah-TanahAdat (Dahulu, Kini Dan Akan Datang)", *Jurnal Sasi*, Volume 25, Nomor 1, 2019.
- Ria Ayu N, Agung Basuki P. Suparno, 2019, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo", *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, Agustus 2019.